

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aprilian, Salis S., *The (L)earning Company*, Bandung: PT Kaba Media Internusa, 2020.
- Bakhri, Syaiful, *Migas Untuk Rakyat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Barata, Atep Adya dan Trihartanto, Bambang, *Perbendaharaan Dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Hayati, Tri, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.
- Harun, Refli, *“Badan Usaha Milik Negara Dalam Sudut Pandang Tata Negara”*, Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Howlett, Michael dan Ramesh, *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*, Toronto: Oxford University Press, 1995.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Alfabeta, 2020.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Marbun SF, Kamelus Deno, *Hukum Administrasi Negara/Dimensi-dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Marpi, Yapiter, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Tasikmalaya: PT Zona Media mandiri, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Pudyantoro, A Rinto, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta: Petromindo, 2012.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- R. Wiratno, *Ahli-ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1958.
- Rahardjo, Agoes Sapto, *Industri LNG & Evolusinya di Indonesia*, Jakarta: Binamedia Agroasia, 2015.
- Rakhmanto, Pri Agung, *LNGnomics-Belajar Ekonomi dari Industri LNG*, Jakarta: Reforminer Institute, 2017.
- Rustendi, Teten, Wibowo Djoko dan Taufik Muhamad Rachman, *Manajemen Proyek di Kilang Badak LNG*, Jakarta: PT Badak LNG, 2016.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Setyadi, Didik Sasono, Zakty, dan Hadariat Kuncara, dan Purnawanty, Jani, *Production Sharing Contract dan Paradigma baru Pengusahaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta: Petromindo, 2023.
- Siregar, Doli D., *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Sjarif, Amiroeddin, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Syeirazi, M. Kholid, *Tata kelola Migas Merah Putih*, Depok: Penerbit LP3ES, 2017.

- Waloejo, Herri, *Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum : Suatu Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djembatan, 1945.
- Yakup, Bahrul Ilmi, *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Zulmawan, Wawan, *Legal Risk Management BUMN*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

B. Artikel Jurnal

- Budianta, Agus, “*Manajemen Aset Berkelanjutan: Sebagai Upaya Optimalisasi Nilai Aset Dengan Pendekatan Conceptual Model*”, Media Kekayaan Negara, Edisi No.33 Tahun X, (2019):51.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “*Wawancara Utama Direktur Barang Milik Negara: Chalimah Pujiastuti*”, Media Kekayaan Negara, Edisi No. 17 Tahun V, (2014):21
- Gie, Kwik Kian, “*Siasat Liberalisasi Ekonomi*”, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II, Nomor 1, (April-Juni 2008):38.
- Tjakrawerdaja, Subiacto, “*Menunggu UU Induk Mengenai Perekonomian Nasional*”, Reform Review (Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis), Volume II, Nomor 1, (April-Juni 2008):40.
- Yance, Arizona, “*Perkembangan Konstitusional Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, (2011): 261.
- Yurista, A.P., Simarmata, R.P., Widowati, D.A., & Bosko, R.E., “*Hak Penguasaan Atas Sumber Daya Alam Dalam Konsepsi Dan Penjabarannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16, No 2, (Februari 2019):154

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Kusumawardhani, “*Tinjauan Yuridis tentang Perubahan Status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero)*”, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Ningrum, Dian Cahya, “*Politik Hukum Pengaturan Privatisasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*”, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Priyatna, D. Yodi, “*Implikasi Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap kegiatan usaha Hulu PT Pertamina (Persero)*”, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Rijanto, “*Alih Status Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*”, *Tesis*, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Risma, Andi, “*Pemanfaatan Barang Milik Negara Idle Dalam Bentuk Sewa Menyewa Sebagai Upaya Penerimaan Negara Bukan Pajak*”, *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

D. Internet

- Badak LNG, Annual Report Badak LNG 2022, <https://badaklng.com/images/2023/Report/annual-report-badak-lng-2022.pdf>, (diakses 12 November 2023).

Pertamina, “Sekilas Pertamina”, <https://www.pertamina.com/id/siapa-kami#:~:text=Berdasarkan%20PP%20No.31%20Tahun,2003%20berdasarkan%20Akta%20Notaris%20No> ., (diakses tanggal 9 Oktober 2023).

SKK Migas, “Laporan Tahunan SKK Migas Tahun 2022”, <https://www.skkmigas.go.id/publication?tab=laporan%20tahunan> , (diakses 10 November 2023).

SKK Migas, “Visi & Misi SKK Migas”, <https://www.skkmigas.go.id/page/Visi%20&%20Misi%20SKK%20Migas/99b838b7-fb26-46c4-b5c4-230ebaf8955d1667400506399> , (diakses 10 November 2023).

Tim Humas DJKN, “Kilang LNG Tertua di Dunia Resmi Dikelola Pertamina”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/16750/Kilang-LNG-Tertua-di-Dunia-Resmi-Dikelola-Pertamina.html> , (diakses tanggal 20 November 2023).

Tolok, Aprianus Doni, “Wamenkeu Minta Aset Kilang LNG Badak Lebih Dioptimalkan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200213/45/1201253/wamenkeu-minta-aset-kilang-lng-badak-lebih-dioptimalkan> , (diakses tanggal 20 November 2023).

E. Perundang -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk usaha Negara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1989).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214)

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731)
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4530)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588)
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 638)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540)
- Peraturan Menteri Keuangan No.87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tatacara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 791).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76 /PMK.06/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549)

Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1133).

Peraturan Menteri Keuangan No.115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318)

Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Keputusan Menteri Keuangan No. 889/KMK.05/2006 tanggal 13 November 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Pengelolaan Kekayaan Negara ex Pertamina

Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tertanggal 2 Mei 2008 Tentang Penetapan Status Aset Eks Pertamina Sebagai Barang Milik Negara

Keputusan Menteri ESDM No. 1869 K/10/MEM/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) Arun dan Liquefied Natural Gas (LNG) Badak.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012/ perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 13 November 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 17 Desember 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003/ perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertanggal 21 Desember 2003